



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS SEBELAS MARET

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DESI SUCI HANDAYANI
2. Jabatan : DEKAN
3. NHK : 546673

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **750.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 368 m2/150 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, Rp. 440.000.000
2. Tanah Seluas 230 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 310.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **451.750.000**

1. MOBIL, HONDA BRIO RS Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
2. MOTOR, HONDA PCX Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 23.000.000
3. MOTOR, HONDA VARIO 125 Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 24.000.000
4. MOTOR, UNITED MOTOR LISTRIK SCOOTER Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 4.750.000
5. MOBIL, HONDA BR-V PRESTIGE CVT Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **----**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **314.842.683**

F. HARTA LAINNYA **Rp.** **----**

Sub Total **Rp.** **1.516.592.683**



III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.516.592.683

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.